

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/321/SJ tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan mengevaluasi secara berkala penyusunan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan bidang tugas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang dikoordinasikan, serta mensinergikannya dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).

KEDUA : Inspektur/Para Kepala Badan/Para Kepala Dinas/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris DPRD/Para Kepala Biro, agar melaksanakan :

- a. penyusunan Data LPPD pada setiap Perangkat Daerah Tahun 2017 sesuai dengan sistematika dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini, dengan mengakomodir laporan dari UKPD/UPT yang berada di bawahnya;
- b. pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran II Instruksi Gubernur ini;
- c. pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran III Instruksi Gubernur ini, yaitu Lampiran III.a yaitu untuk SKPD dengan satu urusan dan Lampiran III.b yaitu untuk SKPD dengan dua urusan;
- d. pengisian data sesuai dengan bidang tugas pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana format dalam Lampiran IV Instruksi Gubernur ini;

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G lantai 10, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Telepon 3822107/3822309 paling lambat Minggu Keempat bulan Februari 2018 dalam bentuk hard copy dan soft copy diemail ke lppd.dki.2014@gmail.com;

- e. penyampaian data seorang pejabat yang ditunjuk sebagai penghubung (Laison Officer/LO), yang menguasai informasi dan permasalahan pada SKPD masing-masing, dengan biodata sebagaimana tercantum pada Lampiran V Instruksi Gubernur ini, paling lambat Minggu Pertama bulan Februari 2018;
- f. para SKPD/UKPD dapat melihat tugas dan petunjuk data pokok yang diperlukan dalam penyusunan LPPD serta menyiapkan data pendukung sebagaimana dalam Lampiran VI Instruksi Gubernur ini; dan
- g. penyampaian data/informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan terkait dengan LPPD kepada Tim Monitoring dan Evaluasi LPPD Tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta serta kooperatif kepada Tim Teknis Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Para Walikota dan Bupati agar merekapitulasi laporan/data dari Sekretariat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2017 dan memasukkannya ke dalam data pendukung Urusan Otonomi Daerah serta menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat Minggu Keempat bulan Februari 2018 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

- KEEMPAT** : Laporan dari Perangkat Daerah yang dipecah atau digabung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 agar dikoordinasikan secara bersama antara SKPD/UKPD yang lama dan baru.
- KELIMA** : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan penyusunan LPPD Provinsi paling lambat Minggu Ketiga bulan Maret 2018, dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2018, melaksanakan self assesment (evaluasi mandiri), serta melaksanakan monitoring dan evaluasi LPPD 2017 dan menerima Tim Teknis Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2017 pada Triwulan III Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta saling berkoordinasi membantu pelaksanaan penyusunan dan evaluasi untuk mencapai target indikator pencapaian Gubernur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 15 TAHUN 2018
Tanggal 30 Januari 2018

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DATA LPPD

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

B. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

1. Data Kependudukan
2. Ruang lingkup sasaran

Diisi data-data obyek (sasaran) dalam bentuk tabel.

Catatan :

Khusus untuk Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi memasukkan uraian tentang :

- a. Data georafii (jumlah Kecamatan, Kelurahan, RT, RW)
- b. Data demografi :
 - Jumlah rumah tangga (per Kecamatan);
 - Jumlah rumah/rumah susun (per Kecamatan);
 - Jumlah rumah bersanitasi baik (per Kecamatan);
 - Jumlah rumah pengguna air bersih (per Kecamatan);
 - Tingkat kemiskinan (per Kecamatan).
- c. Data Kewilayahan lainnya.

C. Data Ekonomi;

1. Potensi keunggulan daerah
2. Indeks pembangunan manusia
3. Ketenagakerjaan
4. Perumahan
5. Kemiskinan
6. PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

Diisi visi dan misi Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

C. Prioritas Daerah

Kebijakan pembangunan prioritas Provinsi DKI Jakarta tahun 2017

BAB III URUSAN KONKUREN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Ringkasan Urusan Konkuren

1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib

No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
	Jumlah							

2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan

Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing urusan pilihan.

No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
	Jumlah							

Catatan :

- 1) Dalam hal ini SKPD dianggap melaksanakan urusan pokok sesuai dengan kewenangan (urusan), tupoksi dan kelembagaannya. Satu SKPD dapat melaksanakan lebih dari satu urusan.
- 2) Yang dimaksud Urusan Wajib adalah :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;

- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, PUM, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Perpustakaan; dan
- z. Kearsipan.

3) Yang dimaksud Urusan Pilihan adalah :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketrasmigrasian.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur susunan organisasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

- 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
- 2. Program dan Kegiatan
 - a. Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah

Contoh : Tabel Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah Urusan.....

No.	Program Nasional	Program Daerah
Jumlah		

B	Eselon (jumlah)								
	• Eselon I								
	• Eselon II								
	• Eselon III								
	• Eselon IV								
	• Eselon V								
	• Fungsional								
	• Staf								
C	Pendidikan(jumlah)								
	• S3								
	• S2								
	• S1								
	• Diploma								
	• SLTA								
	• SLTP								
	• SD								

Catatan :

Kolom 3 sampai 9 disesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada SKPD masing-masing.

b. Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan, Pangkat dan Diklatpim.

Tabel : Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural pada Dinas/ Badan.....

No.	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang Terisi	Jumlah Pejabat yang Memenuhi Persyaratan		
				Pendidikan	Pangkat	Diklatpim
1	2	3	4	5	6	7
1	• Eselon I					
	• Eselon II					
	• Eselon III					
	• Eselon IV					
	Jumlah					

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Merupakan akumulasi data dari SKPD, UKPD dan UPT dari SKPD yang bersangkutan.

Tabel : Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan.....

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
Anggaran Urusan Pendidikan		
1. Belanja tidak langsung		
2. Belanja langsung		
a. Belanja Barang dan Jasa		
b. Belanja Pemeliharaan		
c. Belanja Modal		
d. Belanja Modal		
Catatan Perbandingan :		
• Alokasi Anggaran Urusan : APBD		
• Belanja Modal : Belanja urusan		
• Belanja Pemeliharaan : Belanja		

Barang dan Jasa		
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Urusan		

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses perencanaan SKPD sesuaikan dengan tupoksi baik merupakan top down yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP, RPJMD/RKPD dan RKT atau Renja SKPD) maupun bottom up, seperti usulan perbaikan sarana, prasarana dan lain-lain.

Contoh Tabel : Sinkronisasi perencanaan program urusan.

No.	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	10	RENJA SKPD; RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	10	RKA: RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	10	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	10		

7. Kondisi Sarana dan Prasana yang digunakan.

a. Prasarana berupa tanah (bila ada).

Diuraikan jumlah seluruh bidang tanah yang dikuasai (aset) SKPD dan jumlah bidang tanah yang telah dimanfaatkan (bila mungkin dengan luasnya).

b. Prasarana utama pendukung tupoksi.

Contoh : Dinas Pendidikan menyajikan data jumlah sekolah, jumlah gedung sekolah, jumlah laboratorium sekolah, dll; Dinas Pemuda dan Olahraga menyajikan data jenis dan jumlah fasilitas olahraga dan seterusnya.

c. Fasilitas/prasarana informasi.

Contoh Tabel : Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Dinas/Badan.....

No.	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Dinas	JP	JU	JB	JS	JT	KS	UPT	
1	Papan Pengumuman									
2	Kotak Pengaduan									
3	Media Massa									
4	Email									

Catatan :

- Website :
- Email :

d. Prasarana dan sarana lain yang patut dilaporkan.

8. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta solusi pemecahannya.

Contoh : Beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- a. Saat ini dibutuhkan banyak pegawai sebagai penjaga sekolah, guru olahraga dan guru lainnya.
- b. Terdapat 233 SDN dan 39 SMPN yang berada di daerah rawan banjir.
- c. Masih banyak fasilitas gedung yang perlu direhabilitasi seperti ruang perpustakaan, laboratorium dan ruang UKS serta rumah dinas Kepsek/guru/penjaga sekolah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap menambah SDM aparatur dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kekurangan penjaga sekolah antara lain diatasi dengan Petugas Harian Lepas (Phl) yang dibiayai oleh sekolah yang bersangkutan. Sedangkan penambahan tenaga guru dilakukan sesuai dengan formasi dan prioritas rekrutmen pegawai, perbaikan gedung dan prasarana sekolah lainnya dilakukan dengan rehabilitasi ringan sampai rehabilitasi berat/total.

9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

- a. Daftar dasar hukum pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik sesuai dengan urusan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk Perda, Pergub atau Keputusan Kepala SKPD (contoh tentang pedoman, juklak, juknis, SOP dll).
 - b. Hal-hal yang bersifat inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang bersifat SDM, prosedur, teknologi informasi, dll.
 - c. Prestasi nasional dan internasional yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan (disesuaikan dengan urusan yang menjadi tupoksi).

Diuraikan persis sama dengan Sub B dengan penambahan pada poin 2 yaitu Realisasi Program dan Kegiatan sehingga menjadi total 10 poin.

- D. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang lainnya).
1. Perangkat Daerah Pelaksana.
 2. Program dan Kegiatan.
 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).
7. Permasalahan dan Solusi.
8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.

E. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol dan Inspektorat).

Diuraikan persis sama dengan Sub D.

F. Indikator Kinerja Kunci (IKK).

1. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta data terlampir (Lampiran II).

2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran III.a dan Lampiran III.b.

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, tingkat pencapaian kinerja urusan wajib dan pilihan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Lampiran IV).

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017.

Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

BAB V TUGAS PEMBANTUAN.

A. Tugas Pembantuan yang Diterima.

1. Dasar hukum.
2. Instansi pemberi tugas pembantuan.
3. Program dan kegiatan.
4. Realisasi pelaksana program dan kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan.
7. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, ~~pejabat~~ dan golongan.
8. Kondisi sarana dan prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang mencukupi atau lainnya).
9. Permasalahan dan solusi.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan.

1. Dasar hukum.
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota untuk Provinsi.

3. Sumber dan jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.

A. Kerjasama Antar Daerah.

1. Daerah yang diajak kerjasama.
2. Dasar hukum.
3. Bidang kerjasama.
4. Nama kegiatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah.
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka waktu kerjasama.
9. Hasil (output) dari kerjasama.
10. Permasalahan dan solusi.
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Diuraikan persis sama dengan Sub A.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.

1. Forum koordinasi.
2. Materi koordinasi.
3. Instansi vertikal yang terlibat.
4. Sumber dan jumlah anggaran.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah.
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan.
8. Hasil dan manfaat koordinasi.
9. Tindak lanjut hasil koordinasi.
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

D. Pembinaan Batas Wilayah.

1. Sengketa batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada).
2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu ditindaklanjuti).
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah.
4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (sesuaikan dengan tupoksi/kegiatan).

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status bencana (nasional, regional/provinsi atau lokal/Kabupaten/Kota).
3. Sumber dan jumlah anggaran.
4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana.
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
7. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana.
8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus.

1. Jenis kawasan khusus.
2. Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum penetapannya.
3. Sumber anggaran.
4. Permasalahan yang dihadapi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kawasan khusus.
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatism atau lainnya).
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani.
3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
4. Penanggulangan dan kendalanya.
5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan.
6. Sumber dan jumlah anggaran.

BAB VII PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Berisi rangkuman evaluasi dan kajian/analisis secara menyeluruh tentang materi laporan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V yang berupa pernyataan-pernyataan, misalnya :

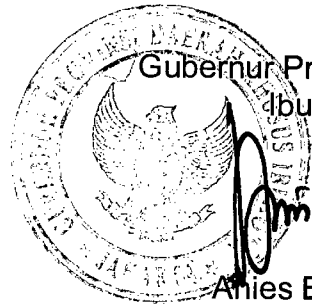
Program ini (disebutkan) berjalan lancar dan berhasil sesuai rencana, atau pelaksanaan kegiatan ini (sebutkan) tidak mencapai target yang ditentukan, karena sebab-sebab tertentu (sebutkan sebab-sebabnya).

Hambatan yang menonjol adalah penyebab kurang lancarnya pelaksanaan pekerjaan seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait atau terlalu sempitnya waktu pelaksanaan dan sebagainya.

B. Saran

Berisi gagasan atau pemikiran untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Saran juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, misalnya :

Sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan ganti rugi kepada yang berhak sebagai akibat tanahnya digunakan untuk kepentingan pembangunan waduk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka disarankan agar dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh kepastian kepemilikan tanah dan status tanahnya.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Nomor 15 TAHUN 2018
Tanggal 30 Januari 2018

INDIKATOR KINERJA KUNCI TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1.	Kab/Kota memiliki Perda IMB	Jumlah Kab/Kota memiliki perda IMB dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam Provinsi	Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak ---- daerah Kab/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih.	Ada/tidak	Sumber data dari DinasTata Kota atau PTSP
		Peraturan ttg kependudukan	2.	Perda tentang kependudukan	Jumlah Kab/Kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP - Jumlah Kab/kota. %	Sumber data dari Dinas Dukcapil
2.	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR	Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3.	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2017 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	- Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017 = ---- orang - Jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 = ----orang	... per 50.000 penduduk	Sumber data dari BKD dan Dukcapil
		Penyampaian laporan kepada pemerintah	4.	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007	Waktu Penyampaian LPPD 2016 (tanggal/bulan/tahun)	Bukti Pengiriman : LPPDTahun 2017 disampaikan pada tanggal-----2018 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal-----2018.	Tepat/ tidak	Sumber data dari Biro Pemerintahan/ Otda

20

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
	PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5.	Ketepatan waktu penyampaian Lap Keuangan dan Lap Kinerja berdasarkan PP 8/2006	Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 2017 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Bukti Pengiriman : Laporan Keuangan 2017, disampaikan ke BPK RI tanggal----2018 sesuai Surat Pengantar Nomor---- tanggal ----2017	Tepat/tidak	Sumber data dari BPKD dan ORB
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Waktu Penyampaian Laporan Kinerja 2017 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Bukti Pengiriman: Penyerahan LAKIP Kab/Kota/Provinsi Tahun 2017 disampaikan ke Kementerian PAN dan RB tanggal ----2018 sesuai Surat Pengantar Nomor---- tanggal ---- 2017	Tepat/tidak	1. SPM Pendidikan 2. SPM Kesehatan 3. SPM PU dan Tata Ruang 4. SPM Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5. SPM Trantibum dan Linmas 6. SPM Sosial Sumber data dari Bagian ORB
				Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota 1. Kab/kota xxx Urusan, 2. Kab/kota xxx Urusan 3. Kab/kota xxx Urusan 4. Kab/kota xxx Urusan, dst Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak---- Kab/Kotaurusan	

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	7.	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku sampai tahun 2017 1. No dan tgl MOU yang berlaku s.d.tahun 2017 2. No dan tgl MOU yang berlakus.d tahun 2017 3. Dst...	Jumlah MOU yang masih berlaku sampai tahun 2017 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama ----- 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama ----- 3) Dst...MOU	Sumber data dari Biro Pemerintahan
3.	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8.	Kesesuaian prioritas pembangunan	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional dibagi 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional.	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak ----- program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak ----- program %	Sumber data dari BAPPEDA
		Kewenangan	9.	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Total dan capaian kinerja urusan yang dilaksanakan Kab/ Kota dibagi Jumlah Kabupaten/ kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan.	Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan Kab/ Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan %	
		Keuangan	10.	Waktu penetapan Perda APBD 2017	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2017	Apabila TEPAT : Sebutkan dasar hukumnya Perda Nomor: -----Tahun---- --tentang-- ----APBD2017	Tepat/ tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKD/ Hukum. Tidak tepat, apabila APBD Ditetapkan setelah 31Desember 2017.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
			11.	Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA : Sebutkan dasar hukumnya. Perda Nomor: ----- Tahun-----tentang-- ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Sumber data dari BPKD
			12.	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan Rp ----- 2) Urusan Kesehatan Rp ----- 3) PU dan Tata Ruang Rp ----- 4) Perumahan & Kawasan Pemukiman Rp. --- 5) Trantibum dan Linmas Rp ----- 6) Sosial Rp ----- Total Belanja pelayanan dasar Rp -- Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp----- %	Sumber data dari BPKD. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).

1 Program prioritas pembangunan nasional:(1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ;(2)Pendidikan; (3)Kesehatan; (4)Penanggulangan kemiskinan; (5)Ketahanan pangan; (6)Infrastruktur; (7)Iklim investasi dan iklim usaha; (8)Energy; (9)Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10)Daerah tertinggal,terdepan,terluar dan pasca konflik;dan (11)Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
			13.	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja urusan pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah total belanja x 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2017. 1) Urusan Pendidikan Rp.----- 2) Urusan Kesehatan Rp.----- Total Belanja Pend dan Kes Rp. ----- Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp.-----%	Sumber data dari BPKD
		Pelayanan Publik	14.	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak Perda tentang Pelayanan Publik	Perda tentang Pelayanan Publik ²	Ada/Tidak	Sumber data dari Biro Hukum/PTSP
		Kepegawaian	15.	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2017 dibagi Penduduk pada akhir tahun 2017	- Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2017 - Penduduk pada akhir tahun 2017	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Dukcapil
		Kelembagaan	16.	Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian	ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, Sebutkan nama lengkap dari Sistem database:----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD
			17.	Penataan OPD	Jumlah pembentukan OPD Berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah OPD, sbb : 1) Biro (Setda)=----- unit 2) Dinas = ----- unit	-----unit	Sumber data dari ORB

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
4.	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk perundangan	18.	Jumlah perda tahun 2017	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit= ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya Kabupaten/Kota= -- unit Perda	Sumber data dari Biro Hukum
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	19.	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017, sebanyak----PERDA. - RAPERDA yang diusulkan tahun 2017, sebanyak----RAPERDA. %	Sumber data dari Biro Hukum
5.	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	20.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017 dibagi Keputusan DPRD dalam tahun 2017 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017 sebanyak ---- keputusan - Keputusan DPRD dalam tahun 2017 sebanyak ---- keputusan %	Sumber data dari Set. DPRD

² Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang menetapkan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/Pimpinan LPND.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
6.	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut Keputusan Gubernur (Kep Gub)	21.	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah Kep Gub yang ditindak lanjut dibagi jumlah Kep Gub dalam tahun 2017 x 100%	- Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak ----- keputusan. %	Sumber data dari Biro Hukum
7.	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tindak lanjut Peraturan Gubernur (Per Gub)	22.	Peraturan Gubernur yang ditindak lanjut	Jumlah PerGub yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Per Gub dalam tahun 2017 x 100%	- Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. - Peraturan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak ----- %	Sumber data dari Biro Hukum
7.	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23.	Jumlah Perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan dibagi jumlah perda yang dikirim pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak -----, yang terdiri dari : 1) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang --- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang --- Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- Perda. %	Sumber data dari Biro Hukum
8.	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN	Perda atau Per Gub tentang konsultasi publik	24.	Keberadaan perda atau Per Gub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada Perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya.	Ada/tidak	Sumber data dari Biro Hukum/ BAPPEDA

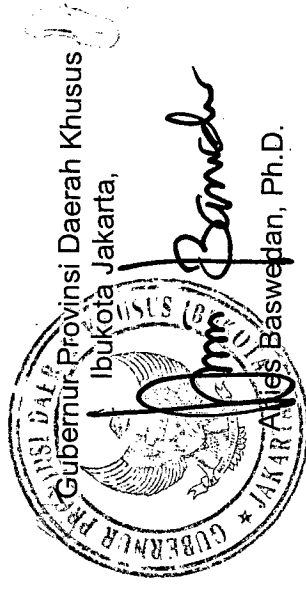
No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
	MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	25.	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro, humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Per Gub	Perda atau Pergub Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik) Apabila Ada, - Sebutkan nama media informasinya -----dan. - Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9.	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26.	Dana perimbangan yang terserap yang dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017 sebesar Rp ----- - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD)
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	27.	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU thn 2017 x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD)
		Alokasi Belanja pada APBD	28.	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi APBD x 100%	Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD)
10.	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD (Realisasi) Tahun 2017 dibagi Total Pendapatan dalam	- PAD APBD Tahun 2017, sebesar Rp ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD)

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
	SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH				APBD (Realisasi) Tahun 2017 x 100%	- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017 (Realisasi), sebesar Rp. -----		
11.	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATAUSAHA, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (LapKeu)	30.	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: -----	Opini tahun 2016 = ---- Opini tahun 2017 = -----	Opini: WTP/ unqualified opinion); WDP/ qualified opinion); TMP/ disclaimer opinion), atau TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion).
		Besaran SILPA	31.	SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. --- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawab an Keuangan (BPKD)
		Realisasi Pendapatan	32.	Realisasi terhadap PAD anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD x 100%	- Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. --- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawab an Keuangan (BPKD)
		Realisasi Belanja	33.	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Pembilang : Sumber data dari Laporan Realisasi Belanja/LRA Penyebut : Sumber data berasal dari total anggaran APBD

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Pengawasan Inspektorat Provinsi	34.	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak ----- temuan. Temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2017, sebanyakK----- temuan %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
12.	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	35.	Realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD ³	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp.----- Potensi PAD pada APBD Tahun 2017, sebesar Rp----- %	Sumber data dari BPKD
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD)	36.	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% Atau (PAD 2017 - PAD 2016) : PAD 2016 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. ----- Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp.----- %	Sumber data dari BPKD (target tahunan dalam RPJMD)
13.	TEROBOSAN/INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37.	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017 Penghargaan	Sumber data dari OPD yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	38.	Keberadaan E-Procurement	Ada atau tidak ada Perda/ Keputusan KDH tentang E-Procurement	ada/tidak ada PERDA tentang E-Procurement	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP/BPPBJ Data berupa proses e-procurement

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Daya saing daerah	39.	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2017	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2017, sebanyak ----- ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp -----	... ijin	Sumber data dari PTSP (PMDN Nilainya >=500 jt)

³Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD



Nomor 15 TAHUN 2018
Tanggal 30 Januari 2018

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI
UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI :
NAMA SKPD :

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat dikementerian /LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1.	Jumlah Program Nasional yg Dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD% (8)	Lihat Program Nasional RKP 2017 Untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/LPNK	2.	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada/tidak SOP	Jumlah SOP: SOP #1 Pelaksanaan UN SOP #2 Penerimaan Siswa Baru SOP #3 Juknis Kalender Pendidikan Dst...	Ada----- SOP/Tidak Ada:	SOP adalah petunjuk tertulis Mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri Pembina teknis

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3.	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada%	
3.	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4.	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi Jumlah jabatan yang harus adax 100%	- Jumlah jabatan yang ada - Jumlah jabatan yang harus ada%	Sumber data BKD
			5.	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada Jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #1 3. Dst...	Ada/ Tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/update Tahun 2017
4.	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6.	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS Provinsi	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2017
			7.	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim - Jumlah pejabat SKPD yang ada.%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9.	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENUA SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada -RENSTRA SKPD -RENUASKPD -RKA-SKPD% jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENUA SKPD dengan Program RKKPD	10.	Jumlah Program RKKPD yang diakomodir dalam RENUA SKPD	Jumlah program RKKPD yang diakomodir dalam RENUA SKPD dibagi jumlah program dalam RENUA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD - Jumlah program RENUA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD%	Mengacu dokumen RKKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENUA SKPD	11.	Jumlah Program RENUA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENUA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENUA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD - Jumlah Program dalam RKA SKPD%	Mengacu dokumen RKA-SKPD Tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13.	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD Total belanja APBD (anggaran)%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2017
		Besaran belanja modal	14.	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Realisasi Belanja Modal SKPD Realisasi Total Belanja SKPD%	Mengacu LKD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15.	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD%	Mengacu LKD tahun 2017
		Laporan keuangan SKPD	16.	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD Total Realisasi Belanja SKPD%	Mengacu APBD tahun 2017
		Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)	17.	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak----- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Laporan keuangan SKPD	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, Calk)	

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18.	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19.	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x100%	Asset yang tidak digunakan, sebanyak----- asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak----- asset.%	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/ Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan 3. Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/ dimanfaatkan
8.	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20.	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Jumlah sebanyak -----jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21.	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	abjila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang-----	Ada/ Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Aries Baswedan, Ph.D.

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan -----
2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Keterangan
						Urusan(1)-----	Urusan(2)-----	Urusan (1)-----	Urusan (2)-----	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN	Program Nasional (Yang melekat di kementerian/ LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1. Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD		Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi Jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak----- program. Jumlah program nasional Yang dilaksanakan SKPD, sebanyak----- program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak----- program. Jumlah program nasional Yang dilaksanakan SKPD, sebanyak----- program%%	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c.q. Departemen/ LPND		2. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)		Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak-----yang terdiri dari: 1. SOP tlg----- 2. SOP tlg----- 3. SOP tlg----- 4. Dst-----	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak----- yang terdiri dari: 1. SOP tlg----- 2. SOP tlg----- 3. SOP tlg----- 4. Dst-----	Ada----- SOP/ TidakAda:	Ada----- SOP/ TidakAda:	Sesuai urusan.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Persamaan	JenisData		CapaianKinerja		Keterangan
						Urusan(1)----	Urusan(2)----	Urusan (1)----	Urusan (2)----	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2.	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3.	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak----- PERDA yang seharusnya, Sebanyak SPM	PERDA pelaksanaan sebanyak----- PERDA yangsehatusnya, sebanyak---%%	1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM LingkunganHid up 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.
3.	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4.	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang terisi sebanyak----- Jabatan yang ada, sebanyak-----	Jabatan yang terisi sebanyak----- Jabatan yang ada, sebanyak-----%%	
			5.	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,-----	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,-----	Ada/tidaka da	Ada/ tidak ada	
4.	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dgn urusan terkait	6.	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak-----personil Total PNS Provinsi, sebanyak-----personil	PNS yang menangani urusan (2) SKPD, sebanyak-----,personil Total PNS Provinsi, sebanyak-----personil	Lihat Petunjuk pengisian IKK

30


No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Keterangan
						Urusan(1)----	Urusan(2)----	Urusan (1)----	Urusan (2)----	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7.	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak -----org. Pejabat yang ada, sebanyak-----org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak-----org. Pejabat yang ada, sebanyak-----org.%%	
			8.	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan keangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan keangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi keangkatan, sebanyak-----org. Jabatan yang ada, sebanyak-----jbt.	Pejabat yang memenuhi keangkatan, sebanyak-----org. Jabatan yang ada, sebanyak-----jbt.%%	
5.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh SKPD	9.	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA -SKPD -RENJASKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak-----jenis, yg terdiri dari: 1..... 2..... 3.....	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014, sebanyak-----jenis, yg terdiri dari: 1..... 2..... 3..... jenis dokumen jenis dokumen	

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Keterangan
						Urusan(1)----	Urusan(2)----	Urusan (1)----	Urusan (2)----	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENCJA SKPD dengan Program RKP	10.	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENCJA SKPD	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENCJA SKPD	Program RKP yang diakomodir dalam Rencja SKPD, sebanyak----- program.	Program RKP yang diakomodir dalam Rencja SKPD, sebanyak----- program.%%	Mengacu dokumen RKP tahun 2017 dan Rencja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi Program RKA SKPD dengan Program RENCJA SKPD	11.	Jumlah Program RENCJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENCJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Program RENCJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak----- program.	Program RENCJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak----- program.%%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Rencja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12.	Jumlah Program RENCJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENCJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD x 100%	Program RENCJA SKPD yang diakomodir dalam DP SKPD, sebanyak----- program.	Program RENCJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak----- program.%%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Persamaan	JenisData		CapaianKinerja		Keterangan
						Urusan(1)----	Urusan(2)----	Urusan (1)----	Urusan (2)----	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6.	PENGELOL AAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13.	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp,----- - Total Belanja APBD, sebesar Rp,-----	- Total belanja SKPD, sebesar Rp,----- - Total Belanja APBD, sebesar Rp,-----%%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2017
		Besaran belanja modal	14.	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPDx100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.----- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp.----- - Total Belanja SKPD,sebesar Rp.-----%%	Mengacu LKD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15.	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD)x100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.-----	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.-----%%	Mengacu LKD tahun 2017
			16.	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPDx100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.-----	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.-----%%	Mengacu APBD tahun 2017
	Laporan keuangan SKPD		17.	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca,Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak----- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada,sebanyak----- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	TidakAda/ Ada sebanyak-----jenis:	TidakAda /Ada sebanyak-----jenis:	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca,LRA,Ca LK)

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Keterangan
						Urusan(1)----	Urusan(2)----	Urusan (1)----	Urusan (2)----	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18.	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19.	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Asset yang tidak digunakan, sebutkan asset. Asset yang dikuasai SKPD,sebanyak asset.	Asset yang tidak digunakan, sebanyak asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak asset.%%	Inventarisasi dilakukan minimal 1kali dalam 5 Tahun
8.	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20.	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media Masa	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Jumlah sebanyak-- jenis.	Jumlah sebanyak-- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas /prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Keterangan
						Urusan(1)----	Urusan(2)----	Urusan (1)----	Urusan (2)----	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21.	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang-----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang-----	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD


 Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,
Anies Baswedan
 Anies Baswedan, Ph.D.

Nomor 15 TAHUN 2018
Tanggal 30 Januari 2018

IKK TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD
TERHADAP LPPD TAHUN 2017

URUSAN WAJIB						
No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendidikan	1.	Pendidikan Luar Biasa(PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI -----x100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI%	Pembilang dari Dinas Pendidikan Penyebut berasal dari Dinas Sosial/Dukcapil
		2.	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS -----x100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS%	Pembilang dari Dinas Pendidikan Penyebut berasal dari Dinas Sosial/Dukcapil
		3.	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA -----x100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA%	Pembilang dari Dinas Pendidikan Penyebut berasal dari Dinas Sosial/Dukcapil
		4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/ Paket C ----- x 100 % Jumlah Penduduk kelompok usia 16 -18 tahun%	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Dukcapil

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA			$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA			$\frac{\text{Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA			$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
8.	Pembinaan Guru jenjang SD/MI			$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SD/MI}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
9.	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS			$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SMP/MTS}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
10.	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA			$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
11.	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan			Peta penjaminan mutu pendidikan	Ada/ tidak*)	Sumber data dari Dinas Pendidikan

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Kesehatan	12.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
13.		13.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
14.		14.	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
15.		15.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
16.		16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBCBTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBCBTA (+) dalam kurun wkt yang sama}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
17.		17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun wkt yang sama}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kesehatan

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		18.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien maskin disarana kesehatan Strata 1 ----- x 100% Jumlah seluruh maskin di Kota%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
		19.	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. Sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100% Jumlah seluruh bayi lahir hidu pd satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
3.	Lingkungan Hidup	20.	Pencemaran Udara	Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri ----- x 100% Jumlah seluruh kabupaten dan kota%	Sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup
		21.	Pasar	Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik ----- x 100% Jumlah seluruh pasar tradisional%	Biro Perencanaan/ BPBUMD
		22.	Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m3) ----- x 1000 Jumlah penduduk%	Pembilang dari Dinas LH Penyebut dari Dukcapil
		23.	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan penda ----- x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada%	Sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup
4.	Pekerjaan Umum	24.	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik -----x100% Panjang seluruh jalan provinsi%	Dinas Bina Marga
		25.	Rumah tangga bersantiasi	Jumlah rumah tangga ber santiasi ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga%	Biro PKLH

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		26.	Kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh ----- Luas Wilayah ----- x 100 %% -----% -----	Dinas Perumahan / Bappeda
5.	Tata Ruang	27.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau ----- x 100 % Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta% -----%	Biro PKLH, Dinas Kehutanan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6.	Perencanaan Pembangunan	28.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Bappeda
		29.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Bappeda
		30.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKKPD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Bappeda
7.	Perumahan & Kawasan Permukiman	31.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKKPD	Jumlah program RKKPD tahun berkenaan ----- x 100% Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan% -----%	Bappeda
		32.	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga% -----%	Biro PKLH
		33.	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ----- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah permda ybs.% -----%	Biro PKLH dan Dinas Perumahan
8.	Kepemudaan & Olahraga	34.	Gelanggang /balai remaja(selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota -----x1000 Jumlah penduduk% -----%	Pembilang dari Disorda dan Penyebut dari Dukcapil
		35.	Lapangan olah raga	Jumlah lapangan olahraga yang ada -----x1000 Jumlah penduduk% -----%	Pembilang dari Disorda dan Penyebut dari Dukcapil

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Penanaman Modal	36.	Kenalkan/penurunan Nilai Realisasi PMDN(milyarrupiah)	Realisasi PMDN thn 2017- Realisasi PMDN 2016 -----x100% Realisasi PMDN 2016%%%	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP
10.	Koperasi & UKM	37.	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif -----x100% Jumlah seluruh koperasi%%	Dinas Koperasi dan UKM
		38.	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil -----x100% Jumlah seluruh UKM%%	Dinas Koperasi dan UKM
11.	Kependudukan & Catatan Sipil	39.	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada	Ada/ tidak ada	Dukcapil
12.	Ketenaga kerjaan	40.	Pelayanan kespesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif -----x100% Jumlah pekerja/buruh%%	Disnakertrans
		41.	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan -----x100% Jumlah pencari kerja yang mendaftar%%	Disnakertrans
13.	Ketahanan Pangan	42.	Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak	Ada/ tidak ada	DKPKP
		43.	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) -----x1000 Jumlah penduduk%%	DKPKP
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44.	Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Pekerja perempuan dilembaga pemerintah -----x100% Jumlah pekerja perempuan%%	DPPAPP /Disnaskertrans

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		45.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan -----x100% Jumlah angkatan kerja perempuan%	DPPAPP /Disnasketrans
15.	KB&KS	46.	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif -----x100% Jumlah pasangan usia subur%	DPPAPP
		47.	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB(PLKB/PKB) setiap desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan -----x100% PLKB/PKB%	DPPAPP
16.	Perhubungan	48.	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Jumlah angkutan darat -----x100% Jumlah penumpang angkutan darat%	Dishub
17.	Komunikasi & Informatika	49.	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	Ada/tidak ada	Diskominfofik
		50.	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan setahun	Diskominfofik/ Disparbud
18.	Pertanahan	51.	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat milik Pemprov DKI Jakarta -----x100% Luas lahan yang seharusnya bersertifikat milik Pemprov DKI Jakarta	BPAD
19.	Kesbangpol	52.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Bakesbangpol
		53.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Bakesbangpol
20.	Otonomi Daerah	54.	Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Diskominfofik/OPD yang menangani

No.	Usuran	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		55.	Tapal batas	Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan ----- x100% Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan% Biro Tapem	
21.	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	56.	PKK aktif	Jumlah PKK aktif ----- x100% Jumlah PKK% DPPAPP	
22.	Sosial	57.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Dinas Sosial	
		58.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ----- x100% Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan Dinas Sosial	
23.	Budaya	59.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Disparbud	
		60.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Disparbud	
24.	Statistik	61.	Buku "propinsi dalam angka"	Ada/Tidak	Ada/ tidak*) Diskominfotik	
		62.	Buku "PDRB provinsi"	Ada/Tidak	Ada/ tidak*) Diskominfotik	
25.	Kearsipan	63.	Pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ----- x100% Jumlah SKPD% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		64.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	Perpustakaan	65.	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah x 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		66.	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun x 100 % Jumlahorang dalam populasi yg harus dilayani%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN						
No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelautan dan perikanan	1.	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton/tahun)x100% Target Daerah (Ton/tahun)%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian
		2.	Ekspor hasil perikanan	Nilai export hasil perikanan (Rp) Target daerah%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian
		3.	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)x100% Target Daerah (Kg)%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian
2	Pertanian	4.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama locallainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local lainnya (ha)%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian, Biro Perkonomian

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017**)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian, Biro Perencanaan
3	Kehutanan	6.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$%	Dinas Kehutanan
		7.	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$%	Dinas Kehutanan
4	Energi dan SDM	8.	Pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Penambangan Liar yang diterbitkan}}{\text{Luas area penambangan yang liar}} \times 100\%$%	DPE
		9.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2017**)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	DPE, Biro Perencanaan
5	Pariwisata	10.	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan pertahunorang	Disparbud
		11.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017**)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Disparbud, Biro Perencanaan
6	Industri	12.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017**)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	DPE, Biro Perencanaan
		13.	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2017 - Jumlah Industri tahun 2016}}{\text{Jumlah Industri/tahun 2017}} \times 100\%$%	DPE

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Perdagangan	14.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ----- x 100% Jumlah total PDRB%	Dinas Koperasi, Biro Perekonomian
		15.	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	US\$.....	Dinas Koperasi dan UKM
8	Transmigrasi	16.	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa -----x100% Jumlah transmigran%	Disnakertrans

Keterangan :

*)pilih salah satu

***)Apabila belum tersedia gunakan PDRB Tahun 2016



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran V : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 15 TAHUN 2018
Tanggal 30 Januari 2018

**BIODATA LIAISON OFFICER
LPPD TAHUN 2017**

Nama : _____

NIP/NRK : _____

Pangkat/Golongan : _____

Jabatan : _____

SKPD/UKPD : _____

Alamat kantor : _____

Telp dan Fax kantor : _____

No. Handphone : _____

Alamat email : _____



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anes Baswedan
Anes Baswedan, Ph.D.

Lampiran VI : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 15 TAHUN 2018
Tanggal 30 Januari 2018

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN TAHUN 2017

No.	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI 2. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI 3. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS 4. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS 5. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA 6. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA 7. Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/Paket C 8. Jumlah Penduduk kelompok usia 16 -18 tahun 9. Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA 10. Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya 11. Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA 12. Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajara sebelumnya 13. Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA 14. Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya 15. Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 16. Jumlah Guru jenjang SD/MI 17. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 18. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS 19. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 20. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA 21. Peta penjaminan mutu pendidikan 	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 	Dinas Kesehatan

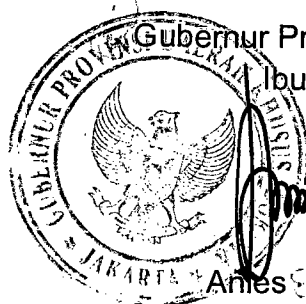
No.	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 4. Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yang sama 5. Jumlah Desa/Kelurahan UCI 6. Jumlah seluruh Desa/Kelurahan 7. Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di saat wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 8. Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 9. Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 tahun 10. Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama 11. Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 tahun 12. Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 13. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 14. Jumlah seluruh masyarakat miskin 15. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. Sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 16. Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 	
3.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kabupaten dan Kota yang dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri 2. Jumlah pasar tradisonal yang tergolong baik 3. Jumlah seluruh pasar tradisional 4. Jumlah daya tampuang TPS (m3) 5. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda dari jumlah kasus yang ada 6. Jumlah kasus lingkungan yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Biro Perekonomian 3. BPBUMD 4. Dukcapil
4.	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik 2. Panjang seluruh jalan Provinsi 3. Jumlah rumah tangga bersanitasi 4. Jumlah total rumah tangga 5. Luas kawasan kumuh 6. Luas wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Bina Marga 2. Dinas Perumahan 3. Biro PKLH
5.	Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas ruang terbuka hijau 2. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta 3. Perda tentang IMB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Kehutanan 3. Biro PKLH

No.	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
6.	Perencanaan dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda RPJPD 2. Perda RPJMD 3. Perda RKPD 4. Jumlah program RKPD tahun 2017 5. Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2017 6. Prioritas Daerah dalam RKPD tahun 2017 yang sesuai dengan prioritas Nasional 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 2. Jumlah seluruh rumah tangga 3. Jumlah rumah layak huni 4. Jumlah seluruh rumah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2. Biro PKLH
8.	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (milik pemerintah) 2. Jumlah lapangan olahraga milik Pemda 3. Jumlah Penduduk tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Pendidikan
9.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai realisasi PMDN 2016 (miliar rupiah) 2. Nilai realisasi PMDN 2017 (miliar rupiah) 3. Jumlah proyek PMDN 4. Nilai realisasi PMA 2016 (miliar rupiah) 5. Nilai realisasi PMA 2017 (miliar rupiah) 6. Jumlah proyek PMA 	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
10.	Koperasi & UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi aktif 2. Jumlah koperasi 3. Jumlah Usaha Mikro & Kecil 4. Jumlah seluruh UKM 5. Jumlah total PDRB tahun 2017 6. Nilai ekspor dan impor DKI Jakarta tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 2. Biro Perekonomian
11.	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan database kependudukan 2. Perda tentang Kependudukan 3. Jumlah penduduk DKI Jakarta per Desember 2017 4. Jumlah penduduk DKI Jakarta yang telah terekam E-KTP 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif 2. Jumlah pekerja/buruh 3. Jumlah pencari kerja yang mendaftar 4. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen regulasi ketahanan pangan 2. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama 	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah 2. Jumlah pekerja perempuan 3. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 4. Jumlah angkatan kerja perempuan 	DPPAPP
15.	KB & KS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pasangan usia subur 2. Jumlah peserta program KB aktif 3. Jumlah PLKB/PKB 	DPPAPP

No.	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
16.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angkutan darat 2. Jumlah penumpang angkutan darat 	Dinas Perhubungan
17.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website milik Pemda 2. Jumlah dan jenis pameran/expo 3. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
18.	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh Luas lahan bersertifikat milik Pemprov DKI Jakarta 2. Jumlah Luas lahan yang seharusnya bersertifikat milik Pemprov DKI Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPAD 2. Biro PKLH
19.	Kesbangpol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Partai Politik 2. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 3. Jumlah LSM, Ormas dan OKP 4. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan LKP 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20.	Otda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 2. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan 3. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan 4. Tanggal dan Nomor Perda Penetapan APBD Tahun 2017 5. Tanggal dan Nomor surat Penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP No. 8/2006 6. Tanggal dan nomor surat penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3/2007 7. Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 8. Jumlah APBD tahun 2017 dan laporan keuangan tahun 2017 9. Jumlah Aset yang dikuasai SKPD/UKPD tahun 2017 dan jumlah aset dalam keadaan baik yang tidak digunakan SKPD/UKPD tahun 2017 10. Realisasi pencapaian PAD 11. Besaran Silpa tahun 2017 12. Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 13. Jumlah PNS dan CPNS Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 per SKPD dan per urusan 14. Jumlah seluruh SPM tahun 2017 15. Jumlah seluruh MOU yang masih berlaku sampai tahun 2017 16. Jumlah system informasi kepegawaian 17. Jumlah Perda Tahun 2017 18. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017 19. Jumlah Raperda yang diusulkan oleh DPRD tahun 2017 20. Jumlah Keputusan DPRD dalam tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. BPKD 3. BPAD 4. BKD 5. BPSDM 6. BPBD 7. BPBJ 8. BPRD 9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 10. Satpol PP 11. Biro Tata Pemerintahan 12. Biro Hukum 13. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 14. Biro KDH dan KLN 15. Biro Umum 16. Biro Perekonomian 17. Biro Penataan Kota dan LH 18. Biro Administrasi 19. Biro Dikmental 20. Biro Kesos 21. Sekretariat DPRD 22. Walikota Jakarta Pusat 23. Walikota Jakarta Utara 24. Walikota Jakarta Barat 25. Walikota Jakarta Selatan 26. Walikota Jakarta Timur 27. Kabupaten Kepulauan Seribu

No.	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
		21. Jumlah Keputusan gubernur dan Peraturan Gubernur tahun 2017 22. Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2016 dan 2017 23. Jumlah Temuan BPK per Desember 2017 24. Jumlah temuan BPK yang telah ditindaklanjuti sampai Desember 2017 25. Jumlah penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga Badan Pusat tahun 2017	
21.	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	1. Jumlah anggota PKK 2. Jumlah anggota PKK aktif	DPPAPP
22.	Sosial	1. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lain-lain yang terdapat di suatu daerah 2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 3. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Dinas Sosial
23.	Budaya	1. Jumlah dan jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah dan jenis sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jumlah sanggar kesenian	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24.	Statistik	1. Buku 'Provinsi dalam Angka' 2. Buku "PDRB Provinsi"	Diskominfotik
25.	Kearsipan	1. Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku 2. Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 2017 3. Jumlah pejabat fungsional kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	Perpustakaan	1. Jumlah koleksi judul buku minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah koleksi buku minimal 2 tahun terakhir 3. Jumlah pengunjung ke perpustakaan setiap tahun minimal 3 tahun terakhir 4. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27.	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah produksi perikanan setiap tahun minimal 2 tahun terakhir 2. Target daerah dalam produksi perikanan 3. Nilai ekspor hasil perikanan per tahun minimal 2 tahun terakhir 4. Target ekspor hasil perikanan per tahun (tahun 2017) 5. Jumlah konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir 6. Target konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
28.	Pertanian	1. Produksi tanaman padi (ton) tahun 2017 2. Luas areal tanaman padi (ha) tahun 2017	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
		3. Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian (Rp Miliar) tahun 2017 4. Jumlah total PDRB tahun 2017	
29.	Kehutanan	1. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2017 2. Luas total hutan dan lahan kritis tahun 2017 3. Luas kerusakan kawasan hutan (ha) tahun 2017 4. Luas kawasan hutan (ha) tahun 2017	Dinas Kehutanan
30.	Energi dan SDM	1. Luas pengembangan liar yang ditertibkan tahun 2017 2. Luas area penambangan yang liar tahun 2017 3. Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan tahun 2017 4. Jumlah total PDRB tahun 2017	Dinas Perindustrian dan Energi
31.	Pariwisata	1. Jumlah kunjungan wisata minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah industri pariwisata minimal 2 tahun terakhir 3. PAD sektor pariwisata minimal 2 tahun terakhir 4. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata (Rp triliun) tahun 2017 5. Jumlah total PDRB (Rp Triliun) tahun 2017	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
32.	Industri	1. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri (Rp triliun) tahun 2017 2. Jumlah industri minimal 2 tahun terakhir	Dinas Perindustrian dan Energi
33.	Perdagangan	1. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan tahun 2017 2. Nilai ekspor tahun 2017 3. Nilai impor tahun 2017	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
34.	Transmigrasi	1. Jumlah transmigran swakarsa tahun 2017 2. Jumlah seluruh transmigran tahun 2017	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Ames Saswedan, Ph.D.